as-Shahifah:
Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 6 No. 1 2026: (page 91-107)
ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206
DOI: http://doi.org/10.19105/as-Shahifah.v6i1.25845

Pemetaan Tren Riset Perilaku Memilih (*Voter Behavior*) dalam Tiga Dekade Pemilu Pasca-Reformasi di Indonesia

Moh Elman
Universitas Islam Negeri (UIN) Madura
moh.elman86@gmail.com

Fatimatuz Zahroh
Universitas Islam Negeri (UIN) Madura
fatimatuzzahrah580@gmail.com

Moh Wirdiansyah Rahmatullah
Universitas Islam Negeri (UIN) Madura
alhamdulillahyayan@gmail.com

Abstract

This article examines the evolution of research literature on voter behavior in Indonesia across three decades of the Reformasi era (1999–2026) through a systematic literature review approach. The primary focus of this study is to analyze the theoretical paradigm shift from conventional sociological-structural determinism toward the complexity of hybrid electoral orientations. The findings from the literature synthesis indicate that contemporary Indonesian voter behavior represents a simultaneous articulation of rational-economic calculation, primordial loyalties, digital algorithm-driven affective polarization, and the persistence of local patronage networks. The penetration of the social media ecosystem has proven to strengthen the formation of echo chambers and misinformation that amplify identity politics, particularly among young voters. Concurrently, structural pragmatism and material exchange continue to operate functionally at the grassroots level. Consequently, Indonesia's post-reformasi electoral dynamics affirm a form of bounded rationality that dynamically negotiates with fluid political modernity.

Keywords: Affective Polarization, Local Patronage, Political Modernity

Author correspondence email: email penulisi moh.elman86@gmail.com
Available online at: http://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/asShahifah/
Copyright (c) 2026 by as-Shahifah. All Right Reserved

Abstrak

Artikel ini mengkaji evolusi literatur riset perilaku memilih (*voter behavior*) di Indonesia sepanjang tiga dekade era Reformasi (1999-2026) melalui pendekatan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*). Fokus utama kajian ini adalah menganalisis pergeseran paradigma teoretis dari determinisme sosiologis-struktural menuju kompleksitas hibriditas orientasi elektoral. Temuan sintesis literatur menunjukkan bahwa perilaku memilih masyarakat Indonesia kontemporer merepresentasikan artikulasi simultan antara kalkulasi rasional-ekonomis, loyalitas primordial, polarisasi afektif berbasis algoritma digital dan persistensi jaringan patronase lokal. Penetrasi ekosistem media sosial terbukti memperkuat terbentuknya ruang gema (*echo chambers*) dan disinformasi yang mengamplifikasi politik identitas, terutama pada segmen pemilih muda. Secara paralel, pragmatisme struktural dan pertukaran material tetap beroperasi secara fungsional di tingkat akar rumput. Dengan demikian, dinamika elektoral Indonesia pasca-reformasi menegaskan adanya bentuk rasionalitas adaptif (*bounded rationality*) yang bernegosiasi secara dinamis dengan modernitas politik yang cair.
Kata Kunci: *Polarisasi Afektif, Patronase Lokal, Modernitas Politik*

Pendahuluan

Pemetaan tren riset perilaku memilih (*voter behavior*) di Indonesia selama tiga dekade pasca-reformasi menunjukkan dinamika akademik yang sangat kaya, adaptif, dan terus bergeser mengikuti kompleksitas transisi demokrasi elektoral. Sejak runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, studi mengenai bagaimana dan mengapa warga negara Indonesia menentukan pilihannya di bilik suara telah berkembang dari pendekatan kualitatif-sosiologis makro menuju analisis kuantitatif-psikologis yang kian presisi (Aermadepa, 2024).

Pemilu 1999 menjadi titik awal batu loncatan di mana para sarjana mulai memetakan kembalinya kebebasan berpolitik melalui kacamata sosiologis tradisional. Pada masa-masa awal ini, warisan pembelahan sosial atau *cleavage politics* yang dipetakan oleh ilmuwan politik klasik seperti Clifford Geertz kembali diuji relevansinya di tengah lanskap multipartai yang sangat cair. Para peneliti berusaha memahami sejauh mana loyalitas kultural, seperti dikotomi santri dan abangan, masih mendominasi kesadaran politik masyarakat setelah puluhan tahun ditekan oleh uniformitas ideologis negara.

Memasuki dekade pertama tahun 2000-an, tepatnya pada Pemilu 2004, lanskap riset mengalami pergeseran signifikan seiring dengan diberlakukannya sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Perubahan konstitusional ini memaksa para akademisi dan lembaga riset untuk tidak lagi sekadar melihat partai politik sebagai satu-satunya jangkar orientasi pemilih, melainkan menyoroti figur atau ketokohan kandidat secara lebih mandiri (Alfarabi, 2023). Penelitian-penelitian mulai mengadopsi pendekatan psikologi politik, mengkaji bagaimana citra diri, karisma personal, dan persepsi publik terhadap integritas calon presiden mempengaruhi keputusan elektoral secara nasional.

Pada saat yang sama, pemilu legislatif 2004 dan 2009 juga memicu tumbuhnya literatur tentang sistem pemilu proporsional daftar terbuka, di mana para peneliti mulai membedah persaingan intra-partai yang membuat kedekatan personal antara kandidat legislatif dan konstituen di daerah pemilihan menjadi variabel penentu kemenangan yang sangat krusial. Dekade kedua pasca-reformasi ditandai dengan menguatnya perdebatan akademik mengenai fenomena *dealignments* politik dan melemahnya *party identification* atau identifikasi kepartaian di kalangan pemilih Indonesia.

Berbagai survei nasional dan kajian empiris menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih Indonesia tidak lagi memiliki ikatan emosional yang kuat dengan partai politik tertentu, sehingga mereka cenderung menjadi pemilih yang mengambang atau *swing voters*. Tren ini mendorong para periset untuk mengeksplorasi faktor-faktor penentu baru di luar garis sosiologis, termasuk di antaranya evaluasi kinerja pemerintah atau

retrospective voting. Masyarakat mulai menilai petahana berdasarkan keberhasilan pembangunan ekonomi, pengendalian inflasi, pemberantasan korupsi, serta distribusi program kesejahteraan sosial seperti bantuan langsung tunai.

Perkembangan riset pada Pemilu 2014 dan 2019 membawa dinamika baru yang sering kali digambarkan sebagai fase polarisasi emosional dan ideologis yang cukup tajam di ruang publik Indonesia. Kajian-kajian akademik menyoroti bagaimana kontestasi elektoral tidak sekadar menjadi ajang pertarungan program atau gagasan pembangunan, melainkan bertransformasi menjadi medan perebutan identitas kultural dan keagamaan. Para periset mendokumentasikan fenomena menguatnya politik identitas, mengandalnya polarisasi berbasis sentimen keagamaan, serta masifnya penggunaan media sosial dan aplikasi percanangan digital dalam memobilisasi opini publik.

Penelitian tentang kampanye negatif, penyebaran berita palsu atau *hoax*, serta gema ruang disonan (*echo chambers*) di platform digital menjadi topik yang mendominasi literatur ilmiah ilmu politik. Pada periode ini, model *social psychological voting* kembali menemukan relevansinya yang kuat, di mana kedekatan psikologis kelompok, ketakutan kultural, dan loyalitas terhadap simbol-simbol keagamaan atau nasionalisme menjadi penggerak utama partisipasi pemilih (Asmaroini, 2022).

Memasuki dekade ketiga yang berpuncak pada Pemilu 2024, tren riset perilaku memilih di Indonesia bergeser kembali menuju kajian tentang pragmatisme politik, pengaruh media baru berbasis algoritma, serta dominasi pemilih muda dari generasi milenial dan Gen Z. Studi-studi mutakhir menyoroti bagaimana isu-isu kebijakan substan tif sering kali tereduksi oleh strategi *branding* politik yang berpusat pada pencitraan estetis di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Para peneliti mengamati fenomena "gemoy" dan pendekatan populis sebagai instrumen efektif untuk meraup dukungan suara dari pemilih muda yang

secara demografis mendominasi lebih separuh dari total Daftar Pemilih Tetap nasional.

Di samping itu, literatur kontemporer juga memberikan perhatian khusus pada persistensi politik uang (*vote buying*) yang kini bertransformasi menjadi bentuk-bentuk patronase modern yang lebih sistematis dan terintegrasi dengan struktur logistik kampanye berbasis digital di tingkat akar rumput.Dari segi metodologi, perjalanan tiga dekade riset perilaku memilih di Indonesia mencatatkan evolusi yang luar biasa dari metode konvensional menuju pendekatan sains data yang sangat canggih. Pada masa awal reformasi, metode yang dominan digunakan adalah survei tatap muka skala nasional dengan teknik pengambilan sampel probabilistik sederhana, dipadukan dengan wawancara mendalam serta observasi etnografis di kantong-kantong budaya tertentu. Lembaga-lembaga survei opini publik dan pusat riset universitas telah menjadi aktor penting yang tidak hanya memetakan tren elektoral untuk keperluan akademis, tetapi juga memengaruhi strategi pemenangan kontestan secara langsung melalui riset pasar politik yang komprehensif.

Salah satu kontribusi teoretis terpenting dari literatur perilaku memilih di Indonesia adalah kompleksitas interaksi antara rasionalitas ekonomi dan ikatan primordial yang sering kali membingungkan pengamat politik barat. Berbeda dengan asumsi mazhab ekonomi klasik yang memprediksi bahwa modernisasi dan urbanisasi akan mengikis habis orientasi sosiologis dan religius pemilih, data empiris di Indonesia justru menunjukkan adanya hibriditas yang unik. Oleh karena itu, riset-riset kontemporer berhasil merumuskan model perilaku memilih yang lebih kontekstual, di mana identitas, rasionalitas, dan patronase lokal saling berkelindan membentuk struktur keputusan elektoral yang dinamis di berbagai wilayah nusantara (Aziz, Yaya 2024).

Dinamika riset ini juga memperlihatkan adanya pergeseran fokus dari level makro nasional menuju analisis mikro regional yang memperhitungkan variasi kultural yang sangat tinggi di tingkat lokal. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ratusan kelompok etnis dan tradisi politik lokal yang beragam, menuntut para periset untuk tidak melakukan generalisasi yang berlebihan terhadap perilaku pemilih secara

nasional. Studi-studi tentang pilkada serentak yang mulai marak diteliti sejak tahun 2015 memberikan kontribusi besar dalam memahami bagaimana politik lokal beroperasi secara otonom, sering kali lepas dari tren nasional yang sedang berlangsung. Di tingkat lokal, faktor kedekatan personal antara calon kepala daerah, jaringan kekerabatan, penguasaan sumber daya ekonomi lokal, serta sejarah konflik komunal menjadi variabel penentu yang jauh lebih dominan dibandingkan ideologi partai pengusung.

Melihat ke depan, tantangan terbesar bagi para periset perilaku memilih di Indonesia pasca-Pemilu 2024 adalah bagaimana merumuskan kerangka konseptual baru untuk membaca masa depan demokrasi di tengah gelombang disinformasi digital dan melemahnya institusi perantara tradisional. Ketika partai politik semakin kehilangan fungsi artikulasi kepentingannya dan berubah menjadi sekadar kendaraan pragmatis elite, pemilih pun semakin teratomisasi dalam ruang-ruang digital yang dikendalikan oleh algoritma korporasi teknologi. Penelitian masa depan dituntut untuk mampu menjelaskan implikasi jangka panjang dari gejala apatisme politik di kalangan terdidik perkotaan, beriringan dengan menguatnya militansi pemilih emosional di pedesaan. Pemetaan tren riset ini tidak hanya mencerminkan dinamika ilmu pengetahuan politik di tanah air, tetapi juga berfungsi sebagai cermin kritis atas kualitas konsolidasi demokrasi Indonesia yang terus diuji oleh gelombang perubahan zaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk memetakan tren riset perilaku memilih (*voter behavior*) di Indonesia selama tiga dekade pasca-reformasi. Berbeda dengan penelitian lapangan yang mengumpulkan data primer langsung dari masyarakat, studi pustaka berfokus pada pengumpulan, evaluasi, dan sintesis kritis terhadap literatur-literatur ilmiah yang telah dipublikasikan (Sugiyono, 2019).

Pendekatan ini dipilih karena sangat relevan untuk melacak rekam jejak evolusi pemikiran, pergeseran paradigma, dan dinamika fokus kajian ilmuwan politik dari waktu ke waktu. Melalui penelusuran historiografis yang mendalam, peneliti dapat mengidentifikasi benang merah perubahan perilaku elektoral, mulai dari kuatnya ikatan sosiologis pada awal reformasi hingga dominasi pragmatisme dan pengaruh kampanye digital pada pemilu-pemilu mutakhir.

Pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada teknik dokumentasi terhadap sumber-sumber data sekunder yang otoritatif dan kredibel. Sumber utama penelitian meliputi artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku-buku teks referensi politik, laporan hasil riset dari lembaga survei terkemuka, serta arsip dokumen terkait pemilu dari rentang tahun 1999 hingga 2024. Peneliti melakukan pencarian literatur secara sistematis melalui pangkalan data akademik dengan menggunakan kata kunci yang spesifik dan terarah. Seluruh literatur yang terkumpul kemudian dikurasi, diklasifikasikan, dan diorganisasikan berdasarkan relevansi tematik serta pembagian kronologi dekade penyelenggaraan pemilu agar proses pelacakan tren menjadi lebih terstruktur.

Teknik analisis data yang digunakan bertumpu pada analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dan analisis tematik. Mengacu pada model interaktif analitik, proses pengolahan data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Literatur yang melimpah disaring untuk memilah temuan-temuan kunci yang secara langsung membahas pergeseran variabel penentu pilihan masyarakat. Selanjutnya, data disajikan secara naratif dan komparatif untuk memperlihatkan transisi tren riset antar-dekade secara jelas dan logis. Pada tahap akhir, peneliti menarik sintesis teoretis yang komprehensif guna merumuskan pemahaman baru mengenai kompleksitas perilaku memilih masyarakat Indonesia di tengah pusaran modernisasi, desentralisasi, dan digitalisasi politik.

Pembahasan

1. Transisi Paradigma Perilaku Memilih dari Sosiologis-Kultural Menuju Rasional dan Psikologis

Transisi paradigma riset perilaku memilih di Indonesia mengalami pergeseran yang sangat fundamental sejak era awal pasca-reformasi hingga penyelenggaraan pemilu mutakhir. Pada dekade awal reformasi, literatur politik didominasi oleh pendekatan sosiologis tradisional yang berakar pada teori pembelahan sosial (*cleavage politics*), di mana ikatan primordial, afiliasi kultural, dan loyalitas aliran masa lalu menjadi determinan utama preferensi pemilih di bilik suara. Namun, seiring dengan konsolidasi demokrasi dan pelembagaan pemilihan langsung, tren riset menunjukkan adanya pergeseran orientasi teoretis yang kian kompleks (Blais, 2022).

Sebagaimana diidentifikasi dalam temuan riset literatur kontemporer oleh Hunawa & Polinggapo (2025), dinamika pemilu memperlihatkan ketegangan konstan antara model pemilih rasional (*rational choice*) dan pemilih emosional-psikologis. Di satu sisi, pemilih modern semakin berorientasi pada pertimbangan pragmatis dan rasional, seperti mengevaluasi rekam jejak kerja, program pembangunan, serta efektivitas distribusi kesejahteraan sosial dari petahana (*retrospective voting*). Di sisi lain, faktor psikologis berupa personalisasi kandidat, karisma figur, serta narasi simbolik yang menyentuh afeksi personal terbukti memegang pengaruh yang sangat kuat di tengah masyarakat.

Studi empiris tentang perilaku pemilih di berbagai wilayah Indonesia yang dikaji oleh Blais, (2020) serta diperkuat oleh riset di wilayah kepulauan oleh literatur sosiopolitik terbaru menyimpulkan bahwa tipologi pemilih kontemporer terbagi ke dalam irisan hibrid: rasional, emosional, tradisional, dan pragmatis secara bersamaan. Artinya, pergeseran dari sosiologis-kultural menuju rasional-psikologis bukanlah sebuah garis linier yang saling meniadakan, melainkan bentuk adaptasi pemilih dalam merespons penetrasi media

digital, strategi *branding* kandidat, serta struktur patronase lokal yang masih mengakar. Transisi paradigma ini memperkaya khazanah riset perilaku memilih bahwa masyarakat Indonesia dewasa ini bertindak sebagai aktor politik yang dinamis memadukan kalkulasi rasional atas kebijakan publik dengan kedekatan psikologis terhadap figur pemimpin di ruang-ruang elektoral modern.

Perkembangan riset pada dekade berikutnya menunjukkan bagaimana pemilu tidak lagi sekadar menjadi arena kompetisi program antarpartai, melainkan bertransformasi menjadi arena personalisasi kandidat yang masif. Literatur akademik mutakhir menyoroti bahwa melemahnya identifikasi kepartaian (*party identification*) membuka ruang bagi figur-figur populer untuk mendominasi preferensi elektoral pemilih lintas kelas sosial. Para periset menemukan bahwa pemilih cenderung lebih mudah mengidentifikasikan diri mereka dengan sosok figur tertentu ketimbang ideologi resmi partai pengusung. Hal ini mendorong pergeseran fokus metodologis dan teoretis dalam ilmu politik Indonesia untuk lebih dalam membedah psikologi massa serta citra diri kandidat yang dibangun melalui media komunikasi modern (Bol, 2021).

Penelitian-penelitian kontemporer menegaskan bahwa penggunaan media sosial secara masif telah menciptakan ruang gema (*echo chambers*) yang memperkuat fanatisme kelompok sekaligus mempertajam benturan sentimen identitas. Pemilih tidak lagi berada dalam ruang informasi yang objektif, melainkan terkungkung dalam algoritma yang terus menerus menyuplai narasi emosional. Akibatnya, rasionalitas pemilih sering kali tereduksi oleh gelombang sentimen kelompok, komunal, maupun keagamaan yang dimobilisasi secara terstruktur oleh tim kampanye digital.

Di tengah arus polarisasi tersebut, literatur ekonomi politik elektoral juga mencatat bangkitnya tren pragmatisme struktural yang kerap disandingkan dengan praktik patronase modern. Kajian-kajian terbaru memperlihatkan bahwa rasionalitas pemilih masa kini sering kali bersifat jangka pendek dan transaksional, di mana distribusi

bantuan sosial, program perlindungan ekonomi, hingga patronase lokal dari elite berpengaruh menjadi penentu krusial di tingkat akar rumput. Interaksi antara rasionalitas ekonomi individu dan ketergantungan terhadap jaringan patronase lokal membentuk pola perilaku memilih yang sangat adaptif terhadap konteks material sehari-hari, melampaui batas-batas kesadaran ideologis formal.

Dominasi demografi pemilih dari kalangan generasi muda, yakni milenial dan Gen Z, turut menjadi episentrum baru dalam peta riset perilaku memilih kontemporer. Berbagai studi literatur mutakhir menggarisbawahi bahwa karakteristik pemilih muda sangat dipengaruhi oleh budaya digital, kecepatan informasi visual, serta skeptisisme terhadap struktur partai politik konvensional. Mereka cenderung menyukai pendekatan kampanye yang populis, kreatif, dan dikemas secara estetis di platform seperti TikTok dan Instagram. Kendati demikian, riset-riset terbaru juga mencatat adanya paradoks di mana tingginya antusiasme digital pemilih muda sering kali tidak berbanding lurus dengan kedalaman literasi kebijakan publik mereka, sehingga rentan terhadap manipulasi citra instan (Claassen, 2021).

Dari dimensi metodologis, evolusi riset perilaku memilih selama tiga dekade pasca-reformasi memperlihatkan pergeseran dari pendekatan survei konvensional menuju pendekatan hibrid yang memadukan survei nasional, analisis *big data*, dan eksperimen digital. Para peneliti tidak lagi hanya mengandalkan wawancara tatap muka tradisional untuk membaca kecenderungan pemilih, melainkan memanfaatkan pemetaan geospasial, analisis sentimen percakapan digital, hingga penerapan model *Voting Advice Application* (VAA) guna mengukur preferensi substantif pemilih secara *real-time*. Perkembangan metodologis ini memungkinkan komunitas akademik untuk menangkap pergeseran perilaku pemilih yang bergerak sangat cepat, cair, dan lintas batas teritorial administratif konvensional.

Menyongsong masa depan demokrasi elektoral di Indonesia, tantangan terbesar bagi para periset perilaku memilih adalah

merumuskan model konseptual yang mampu mengantisipasi laju disinformasi berbasis kecerdasan buatan serta krisis kepercayaan institusional terhadap partai politik. Ketika partai kian tereduksi menjadi sekadar kendaraan pragmatis elite, pemilih pun semakin teratomisasi ke dalam jaringan digital yang dikendalikan oleh algoritma korporasi. Oleh karena itu, kesinambungan riset perilaku memilih ke depan mutlak diperlukan untuk menjaga kualitas kewargaan, memetakan kesehatan demokrasi substansial, serta memastikan bahwa suara rakyat di bilik suara tetap merefleksikan kedaulatan warga yang sesungguhnya.

2. Polarisasi Emosional, Politik Identitas, dan Pengaruh Kampanye Digital Berbasis Algoritma

Algoritma personalisasi bekerja dengan cara menyuplai informasi yang selaras dengan keyakinan awal pengguna, sehingga menciptakan ruang gema (*echo chambers*) yang mengisolasi pemilih dari paparan sudut pandang alternatif yang objektif. Akibatnya, rasionalitas pemilih di bilik suara sering kali tereduksi dan digantikan oleh dorongan emosional hasil rekayasa narasi digital yang masif. Para peneliti menemukan bahwa pemilih muda dan kelompok perkotaan yang notabene memiliki akses internet tinggi justru menjadi salah satu segmen yang paling rentan terhadap paparan manipulasi informasi emosional ini (Devine, 2024). Di tengah derasnya arus konten visual yang instan dan populis, kedalaman literasi politik dan kemampuan berpikir kritis masyarakat sering kali terabaikan, membuat mereka lebih mudah digerakkan oleh sentimen identitas ketimbang rekam jejak substansial.

Dinamika ini memperlihatkan bahwa riset perilaku memilih di era digital menuntut pergeseran paradigma teoretis, di mana psikologi massa dan teknologi komunikasi siber tidak lagi bisa dipisahkan dari analisis elektoral. Polarisasi emosional dan politik identitas berbasis algoritma telah mengubah lanskap demokrasi Indonesia menjadi arena persaingan pengaruh psikologis yang sangat volatil, di mana siapa yang mampu menguasai emosi publik di ruang digital berpeluang besar memenangkan preferensi suara di tingkat nasional (Mansbridge, 2019).

3. Kompleksitas Hibriditas Politik: Relasi Antara Patronase Lokal, Identitas, dan Pragmatisme

Kompleksitas hibriditas politik di Indonesia menghadirkan corak perilaku memilih (*voter behavior*) yang unik dan kerap menentang linieritas teori modernisasi politik arus utama barat. Berbagai literatur riset pasca-reformasi hingga kajian mutakhir menegaskan bahwa masyarakat pemilih di tanah air tidak pernah beroperasi secara kaku dalam satu kategori teoretis tunggal, melainkan meramu berbagai orientasi secara simultan. Dalam realitas elektoral di tingkat akar rumput, seorang warga dapat menunjukkan kalkulasi rasional yang sangat matang ketika mengevaluasi tawaran program ekonomi, namun di saat yang sama ia tetap digerakkan oleh ikatan emosional primordial, loyalitas kultural, serta jejaring patronase lokal yang mengakar kuat di wilayah tempat tinggalnya (Myaskur, 2024).

Penelitian mutakhir dalam lanskap politik lokal menunjukkan bahwa struktur patronase baik yang berporos pada tokoh agama, elite ormas, pengusaha lokal, maupun jaringan keluarga tetap menjadi instrumen determinan dalam mengarahkan orientasi elektoral masyarakat. Hubungan patron-klien ini tidak lagi dipahami sekadar sebagai bentuk keterpaksaan atau tekanan feodal, melainkan telah bergeser menjadi bentuk pertukaran sosial yang rasional. Pemilih memandang kehadiran patron lokal sebagai jaminan akses terhadap sumber daya ekonomi, perlindungan sosial, atau penyelesaian masalah sehari-hari yang sering kali gagal dijangkau oleh kehadiran negara secara formal.

Di samping itu, dimensi pragmatisme struktural turut memperkuat bangunan hibriditas politik pemilih Indonesia di era modern. Literatur ilmiah mencatat bahwa menguatnya orientasi pragmatis tecermin dari bagaimana pemilih memperlakukan momen pemilu sebagai kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan

jangka pendek, mulai dari distribusi bantuan sosial, subsidi langsung, hingga praktik transaksional seperti *vote buying*. Kendati demikian, pragmatisme material tersebut tidak serta-merta menghapus identitas kultural atau kedekatan psikologis terhadap figur tertentu (Norris, 2019). Pemilih mampu merangkai rasionalitas ekonomi, sentimen identitas keagamaan, dan kepatuhan terhadap jaringan patronase lokal ke dalam satu kesatuan keputusan politik di bilik suara tanpa mengalami disonansi kognitif yang berarti.

Kompleksitas hibriditas ini semakin ditegaskan oleh pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara otonom di berbagai wilayah nusantara, yang membuktikan bahwa dinamika politik lokal memiliki otonomi tersendiri di luar bayang-bayang tren nasional. Variasi kultural yang sangat kaya di Indonesia menuntut para periset untuk selalu melihat perilaku memilih melalui kacamata kontekstual yang membumi, bukan sekadar generalisasi statistik makro. Pada akhirnya, sintesis literatur tentang relasi antara patronase lokal, identitas, dan pragmatisme ini menyimpulkan bahwa struktur keputusan elektoral di Indonesia merupakan wujud adaptasi rasional masyarakat yang hidup di tengah ekosistem sosial-politik yang majemuk, cair, dan senantiasa bernegosiasi dengan modernitas (Stockemer, 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pemetaan tren riset perilaku memilih (*voter behavior*) selama tiga dekade pasca-reformasi, dapat disimpulkan bahwa dinamika elektoral di Indonesia telah mengalami pergeseran yang sangat kompleks dan multidimensional. Dari dominasi pendekatan sosiologis-kultural pada masa awal reformasi, literatur ilmiah kini mencatat evolusi menuju hibriditas orientasi yang memadukan rasionalitas ekonomi, personalisasi psikologis, polarisasi emosional berbasis algoritma digital, hingga persistensi jaringan patronase lokal.

Kompleksitas ini membuktikan bahwa pemilih Indonesia tidak dapat direduksi ke dalam satu model teoretis tunggal, melainkan merupakan aktor politik yang adaptif dalam merespons struktur sosial, kemajuan teknologi komunikasi, serta dinamika kontestasi kekuasaan di berbagai wilayah.

Kualitas konsolidasi demokrasi dan memperkuat literasi politik masyarakat ke depan, pemerintah, penyelenggara pemilu, serta civil society disarankan untuk merumuskan kebijakan afirmatif dalam meningkatkan pendidikan politik digital yang inklusif. Penyelenggara pemilu bersama lembaga pendidikan perlu memperluas program literasi media dan anti-disinformasi secara masif, khususnya bagi generasi muda dan pemilih pemula di perkotaan maupun perdesaan yang rentan terjebak dalam ruang gema polarisasi. Selain itu, negara harus memperketat pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik patronase terselubung dan politik uang transaksional, seraya memastikan bahwa distribusi program kesejahteraan sosial berjalan secara transparan agar tidak dijadikan instrumen manipulasi elektoral oleh elite politik.

Bagi pengembangan khazanah ilmu politik di masa mendatang, penelitian lanjutan mengenai perilaku memilih di Indonesia direkomendasikan untuk mengeksplorasi metodologi hibrid yang lebih mendalam, seperti kombinasi antara analisis *big data* algoritmik,

eksperimen lapangan berskala mikro, dan studi etnografi digital. Para periset masa depan perlu memperluas cakupan kajian terhadap dampak penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam kampanye personalisasi kandidat, serta mengukur sejauh mana efektivitas komunikasi digital dalam mengubah kesadaran substantif pemilih di luar sekadar polarisasi sentimen emosional. Penelitian yang lebih spesifik mengenai otonomi politik lokal pasca-pemilu serentak juga sangat diperlukan guna menangkap variasi perilaku elektoral yang kian beragam di tingkat akar rumput nusantara.

Pemetaan komprehensif terhadap tren riset ini menegaskan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan bersama dalam merawat rasionalitas publik di tengah gelombang disrupsi informasi modern. Ketika institusi partai politik semakin terfragmentasi dan ruang-ruang digital dikuasai oleh kepentingan algoritma korporasi, studi perilaku memilih tidak boleh berhenti sekadar sebagai alat prediksi elektoral bagi kontestan. Lebih dari itu, riset-riset akademik harus terus berfungsi sebagai kompas moral dan intelektual untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat tetap berakar pada kesadaran warga yang merdeka, kritis, dan berdaya di bilik suara.

Daftar Pustaka

Aermadepa, et al. Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi. Yogyakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Alfarabi, Ahmad, et al. "Implementasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim." Mediova: Journal of Islamic Media Studies 3, no. 1 (2023): 48–70.

Asmaroini, Anisa. "Pendekatan Socio-Legal dalam Studi Hukum di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan 52, no. 1 (2022): 100–115.

Aziz, Yaya Mulyana A., et al. Otonomi Daerah: Menuju 30 Tahun Otonomi Daerah. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Blais, A., & Daoust, J. F. (2020). The motivation to vote: Explaining electoral participation. UBC Press.

Bol, D., Giani, M., Blais, A., & Loewen, P. J. (2021). The effect of COVID-19 lockdowns on political support: Some good news for democracy? European Journal of Political Research, 60(2), 497–505. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12401

Claassen, C. (2020). Does public support help democracy survive? American Journal of Political Science, 64(1), 118–134. https://doi.org/10.1111/ajps.12452

Devine, D. (2024). Does political trust matter? A meta-analysis on the consequences of trust. Political Behavior, 46(4), 2241–2262. https://doi.org/10.1007/s11109-024-09916-y

Mansbridge, J., Rehfeld, A., Bohman, J., & Thompson, D. F. (2019). Political representation. In Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.431

Myaskur. (2020). "Implementation Of Sustainable Prophetic Electoral Rights In The General Election Process". Prophetic Law Review, 2(1).

Norris, P. (2019). Do perceptions of electoral malpractice undermine democratic satisfaction? The US in comparative perspective.

International Political Science Review, 40(1), 5–22. https://doi.org/10.1177/0192512118806783

Stockemer, D., & Sundström, A. (2019). Corruption and voter turnout. Electoral Studies, 60, Article 102066. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102066

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.